
Submitted: 01/8/2024	Review: 13/8/2024	Revised: 29/9/2024	Accepted: 30/10/2024
--------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------

DOI. <https://doi.org/10.22437/jphk.v1i1.38999>

Pentingnya Etika Dan Moralitas Dalam Kehidupan Bermasyarakat Bagi Pelajar SLTA Kabupaten Muaro Jambi

Ansorullah¹⁾, Helmi²⁾, Ridham Priskap³⁾, Bustanuddin⁴⁾, Yulia Monita⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Faculty of Law, Universitas Jambi, Indonesia

yuliamonita@unja.ac.id

ABSTRAK

Etika dan moralitas merupakan tolak ukur berperilaku yang baik dan bermartabat. Perkembangan kemasyarakatan dan perkembangan informasi banyak mempengaruhi pola hidup generasi muda kita terutama para pelajar pada tingkat SLTA. Pengaruh budaya pop barat sangat dominan sekali pengaruhnya terhadap para pelajar di Indonesia khususnya di Kabupaten Muaro Jambi. Kondisi ini perlu untuk diambil tindakan agar generasi muda tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang tidak sesuai dengan kultur dan adab budaya dan terutama budaya yang tidak sesuai dengan nilai keagamaan, sehingga mempengaruhi pola etika dan moralitas masyarakat secara khusus di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk menjaga kestabilan dan kondisi para pelajar sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia perlu diadakan penanaman pola pikir dan tata nilai yang bermartabat sesuai dengan prinsip bernegara bangsa Indonesia. Kegiatan tersebut salahsatunya dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum kepada generasi muda akan arti pentingnya etika dan moralitas. Pengabdian dilakukan dengan metode penyuluhan dengan mitra Pelajar SMKN 1 Kabupaten Muaro Jambi.

Kota Kunci: Hukum, Etika, Moralitas, Pelajar.

ABSTRACT

Ethics and morality are the benchmarks of good behaviour and dignity. The development of society and the development of information has influenced the lifestyle of our young generation, especially students at the high school level. The influence of western pop culture is very dominant on students in Indonesia, especially in Muaro Jambi Regency. This condition needs to be taken further so that the younger generation is not easily influenced by cultures that are not in accordance with culture and cultural manners and especially cultures that are not in accordance with religious values, thus affecting the ethical patterns and morality of society specifically in Muaro Jambi Regency. To maintain the stability and condition of students in accordance with the noble values of the Indonesian nation, it is necessary to instill a dignified mindset and values in accordance with the principles of the Indonesian nation. One of these activities is carried out by conducting legal counselling to the younger generation on the importance of ethics and morality. The service was carried out using the counselling method with student partners of SMKN 1 Muaro Jambi Regency.

Keyword : Law, Ethics, Morality, Students.

PENDAHULUAN.

Siswa sekolah menengah pada dasarnya adalah subjek dan subjek gerakan reformasi, dan mereka adalah subjek generasi penerus bangsa yang akan membangun negara dan nusa bangsa ke arah yang lebih baik, serta dituntut memiliki etika dan moral. Etika dan moralitas dapat menjadi alat kontrol bagi siswa dalam melakukan tindakannya.

Etika dan moral menjadi teladan bagi siswa dalam memutuskan dan melakukan sesuatu yang baik atau buruk. Oleh karena itu, makna etika dan moralitas perlu lebih dipahami dan diterapkan di lingkungan pelajar atau mahasiswa. Kenyataannya, masih banyak lagi pelajar atau mahasiswa yang belum mengetahui dan menyadari akan arti moralitas dan peranan etika itu sendiri. Siswa dan siswa yang tidak menunjukkan sopan santun dan sopan santun terhadap guru, siswa yang lebih memilih hidup bebas, menggunakan obat-obatan terlarang, dan bebas bersosialisasi antar siswa dan pelajar, dan lain-lain, yang tidak memiliki Akrakul Kalima. Siswa dan siswa yang tidak mempunyai sikap dan sikap yang baik terhadap guru, yang lebih memilih hidup bebas, penggunaan obat-obatan terlarang, pergaulan bebas antara siswa dengan siswa lain, dan lain-lain, tidak akan mempunyai Akrakul Kalima meskipun diperhitungkan dalam ujian.

Meskipun wajar jika siswa tidak mematuhi peraturan yang berlaku, menyontek merupakan tindakan yang mengabaikan pentingnya etika. Harus kita akui bahwa realita suap yang masif di Indonesia disebabkan oleh masyarakat yang tidak memahami arti kata iman dan etika. Banyak orang berpikir dan percaya bahwa penerima suap saat ini adalah orang-orang yang menyontek saat ujian tanpa merasa bersalah. Jadi, meskipun menyontek diibaratkan korupsi, merampas hak seseorang tanpa memikirkan benar atau salahnya dan melakukan sesuatu tanpa izin, ini semua tentang etika.

Jika para pelajar belum memahami betapa pentingnya etika dan moral dalam membentuk karakter bangsa dan penerusnya, maka kedepannya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang berakhlak dan beretika yang baik. Apakah akan penuh dengan penerusnya. Apa jadinya wajah Indonesia jika didirikan oleh jiwa-jiwa yang penipu dan berakhlak buruk. Hukum merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat selalu mempunyai hukum. Tujuan hukum adalah untuk melindungi

dan mengatur kehidupan individu dan orang lain untuk mencegah konflik dalam masyarakat yang kompleks

Banyaknya kasus yang melibatkan Pelajar atau siswa-siswa menjadikan carut marut kehidupan generasi muda Indonesia. Yang telah melupakan konsep etika dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa kasus lain terkait etika dan moralitas di kalangan Pelajar atau siswa-siswa yang melibatkan para oknum para pihak, diperparah dengan maraknya kasus asusila yang terjadi di lingkungan Pelajar atau siswa-siswa tentu hal ini menjadi suatu perhatian penting.

Melihat permasalahan dan kondisi yang terjadi dikalangan pelajar tersebut, dirumuskan permasalahan dalam kajian ini Bagaimana etika dan moralitas dalam membentuk karakter dan perilaku pelajar, Bagaimana pentingnya pengaruh etika dan moralitas terhadap perilaku pelajar dalam kehidupan dalam bermasyarakat di Kabupaten Muaro Jambi.

PEMBAHASAN

Hukum pada prinsipnya merupakan suatu patokan dalam bernegara yang dilaksanakan dalam sebuah Negara begitupun Indonesia. Hakekat suatu hukum merupakan suatu rangkaian kebijakan terkait bagaimana kita masyarakat bertindak laku dalam kehidupan bernegara dalam keseharian, tujuan dan dari kegiatan tersebut adalah untuk tercapainya, nilai kebahagiaan serta tata tertib didalam lingkungan bermasyarakat.¹ Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at dalam pandangannya mengatakan bahwa hukum adalah itu merupakan tata aturan (orde) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) berkaitan dengan perilaku manusia (masyarakat). Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekwensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja haruslah melihat secara keseluruhan.² Antara hukum dan negara itu tak terpisahkan, dengan adanya hukum maka suatu negara dapat dikatakan negara hukum.

¹ Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, hlm. 2.

² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Kosntitusi Press, 2006, hlm. 13.

Masalah hukum dan etika moralitas adalah masalah kompleks yang membutuhkan perhatian khusus. Perhatian terhadap penegakan hukum sangat penting, karena untuk melaksanakannya seluruh komponen masyarakat harus berperan. Kebobrokan etika dan moralitas hukum Pelajar atau siswa-siswa yang disebabkan oleh kebobrokan moral para Pelajar atau siswa-siswa telah memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat untuk tidak memiliki rasa kepercayaan lagi kepada Pelajar atau siswa-siswa tentu hal ini menjadi dilema dan perhatian kita semua.

Dalam kehidupan hukum, seringkali moral sosial atau etika ini di lupakan. Etika merupakan suatu pedoman atau keyakinan bagi para masyarakat termasuk Pelajar atau siswa-siswa dalam menjalankan kewajibannya sehingga tercipta hukum yang baik, dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Negara merupakan wadah dan tempat interaksi hukum terjadi dan ruang untuk etika dan moralitas terimplementasikan. Karena Negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan badan pemberi suara rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat) merupakan suatu Negara hukum.³ Legalitas merupakan poin utama dalam konteks Negara hukum karena legalitas memberikan kekuatan untuk bertindak yang dilakukan oleh Negara. Gagasan demokrasi yang menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai bentuk keputusan negara harus mendapat persetujuan dari rakyat atau wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat.⁴ Dalam pandangan Burkens, et al dalam Abdul Latief mengatakan bahwa negara hukum (Rechtsstaat) itu suatu negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.⁵ Dengan negara hukum lah etika dan moralitas dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Konsep etika dan moralitas juga berkaitan dengan penegakan hukum yang beretika dan penuh moralitas, kepastian dan keadilan hukum bukan sekedar syarat moral, namun syarat esensial dari hukum itu sendiri. Hal ini sejalan dengan falsafah bangsa dan ideologi nasional Pancasila. Filosofi ini merupakan seperangkat nilai yang mencerminkan cinta dan kebijaksanaan. Perilaku seperti ini perlu ditanamkan pada generasi muda Indonesia

³ Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 13.

⁴ Ibid hlm. 3.

⁵ Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 15.

khususnya di Kabupaten Muaro Jambi. Indonesia adalah negara hukum dan segala perbuatan melawan hukum harus diadili menurut hukum yang berlaku. Idealnya, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Artinya hukum tidak menilai seseorang berdasarkan jabatan atau kekuasaan. Hukum mempunyai nilai bila menghasilkan keadilan dan menjamin kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum ada ketika hukum berfungsi dengan baik dan segala pelanggaran dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang itu sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam penegakan hukum yang tepat. Dalam hal ini aparat penegak hukum wajib bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Persoalan yang menjangkiti Pelajar atau siswa-siswa di Indonesia saat ini lebih disebabkan karena terjadinya degradasi moral dalam kehidupan Pelajar atau siswa-siswa kita. Seharusnya para Pelajar atau siswa-siswa merenungkan kembali apa itu etika dan moralitas yang akhirnya terejawantah dalam perilaku para Pelajar atau siswa-siswa. Dengan demikian degradasi perilaku Pelajar atau siswa-siswa sudah tidak dapat lagi hadir dalam *kehidupan bermasyarakat* kita, jika para Pelajar atau siswa-siswa di Indonesia telah benar-benar konsisten dengan kode etik dan perilaku masing-masing Pelajar atau siswa-siswa.

Etika dan moralitas seyogyanya dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat untuk selalu mengacu pada tujuan hidup yang tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan moralitas yang baik, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia.

Untuk itu arah politik hukum yang dicanangkan oleh Pemerintah juga harus terfokus pada etika dan moralitas, perilaku para Pelajar atau siswa-siswa, meminimalisir perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reformasi perilaku berkenaan dan etika dan moralitas ini harus berawal juga dari Pelajar atau siswa-siswa itu sendiri di negara ini, sehingga perbaikan atas hukum dan etika moralitas tercapai dengan baik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan pelajar yang bermartabat dapat terwujud untuk mencapai kehidupan yang terhormat sesuai konsep etika dan moralitas yang didasari atas landaan beragama.

Etika dan moral penting agar kehidupan tidak terganggu karena terjadi penyalahgunaan kekuasaan, duplikasi wewenang, campur tangan antar instansi, politisasi dalam proses penegakan hukum, dan pengabaian etika moral dalam praktik profesi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Intervensi hukum yang kuat dan semakin

komprehensif harus diterapkan untuk memastikan etika dan moralitas tetap menjadi yang terdepan.

Etika dan moralitas merupakan salah satu permasalahan yang akut yang sering terjadi pada kehidupan pelajar atau siswa-siswa SLTA. Perilaku ini tentu akan menurunkan nilai sosial dan harapan martabat pelajar yang baik. Untuk menjaga keutuhan etika dan moralitas pelajar yang mudah dipengaruhi oleh media dan konten asing perlu dilakukan tindakan-tindakan lanjutan agar menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan etika dan moralitas. Pelajar SLTA merupakan subjek yang lagi berkembang dan mencari jati diri sehingga mudah sekali terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan perilaku masyarakat Indonesia. Kondisi ini memungkinkan terjadi karena sebagian siswa adalah mereka-mereka yang berusia 15-18 tahun sehingga mudah sekali terpengaruh karena dalam upaya mencari jati diri.

Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian karena umumnya mereka belum memahami aspek dari pentingnya etika dan moralitas sehingga perlu diberikan pemahaman tersebut. Pada tingkatan Pelajar SMA termasuk diwilayah Kabupaten Muaro Jambi Pemberihan pemahaman tentang Penyuluhan Tentang etika dan moralitas Di SMKN 1 Kabupaten Muaro Jambi tidak selalu rutin dilaksanakan ditambah mata pelajaran kecenderungan pelajaran yang bersifat Umum, sehingga perlu ditambah dengan masukan dan penguatan pemahaman melalui kegiatan pengabdian ini.

KESIMPULAN

Etika dan moralitas seyogyanya dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat untuk selalu mengacu pada tujuan hidup yang tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan moralitas yang baik, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia. Terutama etika dan Moralitas pelajar dalam kehidupan bermasyarakat dan dilingkungan sekolah

SARAN

Pemahaman akan pentingnya etika dan moralitas harus selalu digalakan. Hal ini berfungsi untuk memberi penguatan karakter dan perilaku pelajar. Sehingga para pelajar selalu menjukan etika dan moral yang baik. Karena Standar nilai bermasyarakat dilihat dari bagaimana etika dan moralitas.

DAFTAR PUSTAKA

Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Kosntitusi Press, 2006.

Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010

Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.